BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan sektor publik adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan maksimal. Kepercayaan publik memberikan entitas sektor publik legitimasi untuk beroperasi, maka tata kelola yang bersih dan transparan harus dibarengi dengan penerapannya (Utami, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian ini, di mana tata kelola yang bersih melalui partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan sektor publik di Kota Surabaya.

Akuntansi yang digunakan pada suatu instansi pemerintah yang merupakan bidang keilmuan dan tidak mempunyai tujuan mencari keuntungan dikenal dengan akuntansi sektor publik. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana pemerintah memenuhi kewajibannya terhadap program kegiatan yang telah disusun (Moediono, 2022). Dengan adanya pengukuran kinerja, pemerintah dapat memberikan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan sektor publik dapat meningkat.

Prinsip tata kelola keuangan merupakan prinsip yang kini perlu dan harus dikembangkan. Penguatan sistem dan kelembagaan berdasarkan undang-undang dan persyaratan penyajian keuangan yang relevan merupakan hal yang penting

untuk mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Upaya peningkatan akuntabilitas melalui keterbukaan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya publik, laporan keuangan harus dihasilkan (Permana & Baehaqi, 2018). Transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Memberikan akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data keuangan menjadi langkah penting dalam mengambil keputusan politik, sosial, dan ekonomi. Transparansi keuangan diterapkan guna memastikan evaluasi kondisi keuangan dan hasil operasional, perbandingan kinerja keuangan aktual dengan jumlah yang dianggarkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan dan ketentuan lainnya, serta untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran (Moediono, 2022). Transparansi ini juga berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang pengelolaan anggaran.

Masyarakat mengharapkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dari pemerintah. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, implementasi akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu keharusan. Konsep akuntabilitas dan transparansi keuangan dapat membantu mewujudkan landasan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat bisa lebih mudah memahami serta terlibat aktif dalam prosedur-prosedur yang penting bagi mereka. Transparansi informasi juga memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang lebih

produktif antara pemerintah dan konstituennya. Sementara itu, pencapaian tata kelola yang optimal sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Keterlibatan aktif warga dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan publik dikenal dengan istilah partisipasi masyarakat (Rahma et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah berperan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah (Nuraeni & Kusuma, 2021). Keterlibatan masyarakat dapat memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan publik dan mendorong pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai daerah otonomi, pemerintah kota memiliki akses langsung ke masyarakat, yang memungkinkan pemahaman lebih baik terhadap tujuan dan kebutuhan mereka. Terwujudnya sifat demokratis, transparan, dan seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai hal yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaannya (Gusnar Ismail, 2022). Namun, di sisi lain, terdapat kemungkinan bahwa pemerintah kota dapat melakukan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sari, 2020). Risiko penyalahgunaan dapat dikurangi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat mendorong akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah, sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan peka terhadap tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial (Rahma et al., 2023) dimana partisipasi tersebut

membantu memastikan bahwa pemerintah bertindak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga ketidakpatuhan terhadap aturan oleh pemerintah dapat diminimalkan.

Pengukuran kinerja merujuk pada penilaian terhadap kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah. Penilaian ini dijadikan tolak ukur pelayanan publik dan dilakukan secara berkala guna mendorong transparansi, akuntabilitas publik, serta partisipasi masyarakat. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menjadi dasar dalam setiap tindakan dan hasil pengelolaan anggaran, sudah sepatutnya dipertanggungjawabkan ke masyarakat sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi (Moediono, 2022). Dengan demikian, pengelolaan anggaran wajib dilaksanakan dengan terbuka serta akuntabel supaya masyarakat bisa memantau dan menilai kinerja pemerintah, memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyelenggaraan *good governance* adalah untuk menjamin penyelenggaraan dari pemerintahan untuk dapat menjadi pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta tanpa adanya nepotisme, korupsi, dan kolusi (KKN). Perwujudan aspirasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berintegritas dan berotoritas, stabilitas pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat mutlak diperlukan (Simorangkir, 2021). Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menaikan kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Penetapan PP No. 71 Tahun 2010 bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan akuntabilitas laporan keuangan. Data akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus masuk akal bagi mereka yang menggunakan laporan tersebut dan membantu dalam pengambilan keputusan. Pengawasan terhadap penciptaan dan pemanfaatan anggaran tidak mungkin dapat dipisahkan dari pencapaian anggaran yang layak (Moediono, 2022). Dengan adanya pemantauan yang menyeluruh, diharapkan anggaran yang digunakan bisa lebih efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini juga memastikan bahwa laporan keuangan yang diperoleh benar-benar menunjukkan kondisi keuangan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu jenis persyaratan transparansi yang mendukung akuntabilitas melalui keterbukaan pemerintah terhadap aktivitas tata kelola sumber daya publik adalah penyusunan laporan keuangan. Transparansi informasi dilaksanakan secara jelas dan relevan, serta didasarkan pada hak masyarakat untuk secara leluasa menerima informasi yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, setiap orang yang membutuhkan pengetahuan terkait kepentingan publik harus mempunyai akses segera terhadap pengetahuan tersebut. Ketika tindakan dan program pemerintah menjalankan mandat rakyat, transparansi berarti menyediakan data keuangan kepada publik dan menjaganya tetap terbuka (Sihombing & Kristiyono, 2018). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta memastikan bahwa anggaran publik dipergunakan secara efisien serta tepat sasaran. Dengan demikian, transparansi keuangan bukan hanya mendukung akuntabilitas melainkan agar memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Instansi pemerintahan daerah yang menjadi subjek dalam penelitian ini merupakan unit-unit dinas yang menjalankan fungsinya di dalam lingkungan Mall Pelayanan Publik (MPP) Siola, berlokasi di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, tepatnya di bekas Gedung Siola. Adapun dinas-dinas yang beroperasi di kawasan MPP Siola tersebut mencakup beberapa unit strategis, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang menangani pengembangan sektor ekonomi rakyat; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata yang bertanggung jawab atas pelestarian budaya, penguatan peran pemuda, serta pengelolaan kegiatan olahraga dan pariwisata; serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berperan sebagai fasilitator utama dalam hal investasi dan penyelenggaraan layanan publik secara terintegrasi.

Berdasarkan temuan awal yang diperoleh melalui penelitian pendahuluan, peneliti menyimpulkan bahwa ketiga dinas yang berkantor di Mall Pelayanan Publik Siola belum maksimal menjalankan prinsip utama dari *Good Governance*. Ketiga dinas yang dimaksud mencakup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata; serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa dinas tersebut belum menyediakan akses terbuka terhadap dokumen Laporan Keuangan yang seharusnya dapat diakses secara bebas oleh publik, khususnya mengenai dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, lemahnya akuntabilitas terhadap dana publik, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan maupun evaluasi kebijakan yang dijalankan oleh dinas-dinas terkait.

Hasil observasi didukung oleh pernyataan salah satu staf Dinas Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa pelaporan keuangan dinas hanya dapat diakses melalui aplikasi yang terbatas untuk pegawai, sehingga masyarakat tidak bisa berpartisipasi aktif atau melakukan evaluasi pertanggungjawaban anggaran dinas, baik dari segi kejujuran maupun objektivitas. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyimpulkan yakni:

Tabel 1. 1 Hasil Observasi Pada Penelitian Awal

No	Keterangan	Hasil/Temuan
1	Partisipasi	Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan anggaran masih minim.
2	Transparansi	Belum ada keterbukaan dalam pemberian informasi data laporan keuangan pada masyarakat secara transparan dan mudah diakses publik.
3	Akuntabilitas	Belum ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap anggaran yang diberikan pada publik.

Sumber: Peneliti

Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk mengakses data laporan keuangan terkini dan memperoleh informasi dari sektor publik (Judijanto & Afandy, 2024). Akses ini penting agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kemampuan ini, transparansi dapat terjaga dan akuntabilitas pemerintah dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, ketiga dinas tersebut belum menerapkan prosedur yang memadai untuk memberikan akses publik terhadap data dan transparansi laporan keuangan. Akibatnya, masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang menjadi hak mereka,

yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap instansi terkait serta memunculkan kesalahpahaman atau kecurigaan atas penggunaan anggaran. Selain itu, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan belum diterapkan sepenuhnya, karena akses terhadap laporan keuangan dan LAKIP masih terbatas hanya untuk pihak internal. Menurut (Kisworo & Sauki, 2019), pemberian akses publik terhadap laporan keuangan dan informasi sektor publik merupakan langkah fundamental untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran dan memastikan bahwa kebijakan yang digunakan selaras dengan kepentingan publik. Hal tersebut bukan hanya meningkatkan rasa percaya publik, melainkan juga mendorong pengawasan partisipatif untuk perbaikan pengelolaan anggaran, sehingga memastikan tata kelola sumber daya yang optimal.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa ada hubungan implementasi akuntabilitas dan transparan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Dari penelitian yang dilakukan (Anggreani, 2023) dan (Simorangkir, 2021), mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Implementasi akuntabilitas dan transparansi yang baik memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian (Rahma et al., 2023) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga memastikan bahwa anggaran digunakan

menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas rakyat.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang ada, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Pengaruh Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah partisipasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi terhadap kinerja keuangan DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota

Surabaya Tahun 2022-2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja keuangan di DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024. Implementasi rekomendasi ini diharapkan bisa menambah efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik, memperbaiki proses pengelolaan keuangan, meningkatkan daya tarik investasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelayanan publik di bidang-bidang terkait.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaatnya dalam memperoleh informasi dan bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan dinas DINKOPUMDAG; DISBUDPORAPAR; DPMPTSP Kota Surabaya Tahun 2022-2024. Informasi ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis, khususnya terkait dengan teori keagenan, yang menekankan pentingnya hubungan antara prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat) dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat dilihat sebagai mekanisme yang memperkuat pengawasan dan akuntabilitas agen (dinas terkait) terhadap prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat/daerah). Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa dipergunakan supaya bisa menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan keuangan sektor publik, terutama berkaitan

dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang bertujuan mengurangi konflik keagenan serta mengoptimalkan pengelolaan anggaran.